BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menurut (Imawan, et al., 2022) dengan Judul " Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Dwi Laundry" Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Diterangkan dalam penelitian ini bahwa usaha tersebut sudah melakukan pencatatan akuntansi, namun dalam pencatatannya masih dilakukan secara manual dan sangat sederhana. Lebih lanjut, pencatatan ini belum mengikuti kaidah yang tercantum dalam SAK EMKM, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan tidak cukup optimal untuk dipakai sebagai landasan dalam menilai kondisi usaha.
2. Dalam penelitian (Olyvia uno, et al., 2019) dengan judul "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo)" menggunakan analisis data sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menunjukkan temuan serupa. Pencatatan keuangan pada Rumah Karawo sangat sederhana hanya berisikan pencatatan penjualan saja. Padahal laporan keuangan yang sesuai standar sangat penting untuk menyokong perkembangan usaha.

3. Berdasarkan (Syah, et al., 2023) dalam penelitiannya “Analisis Penerapan SAK-EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada UMKM Ligastore Makassar) menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan UMKM Ligastore Makassar belum menerapkan SAK EMKM. Pemilik masih membuat laporan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi. Kendala yang dihadapi tidak adanya staf khusus yang menyusun laporan keuangan.
4. Penelitian yang dilakukan (Yuniar, et al., 2025) dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan Berdasar Sak Emkm: Faktor Bisnis Dan Pemilik UMKM” melakukan kuesioner tertutup pada 100 pelaku UMKM di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, hasilnya menunjukan pemilik UMKM dengan Pendidikan lebih tinggi lebih memperhatikan pengelolaan keuangan, sementara yang lain hanya melakukan pencatatan manual saja.
5. Dikemukakan (Utari, et al., 2022) lewat penelitiannya yang berjudul “Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Studi Kasus UMKM Di Kota Tanjungbalai dengan metode deskriptif dan metode kuisioner. Dari 98 UMKM hanya 12 yang menerapkan SAK EMKM dalam pelaporannya. Kendala utamanya keterbatasan waktu dan energi dalam pelaporan. Pelaporan berdasarkan SAK EMKM dianggap ribet dan memperlambat.
6. Dalam penelitian (Lasmi, S, et al., 2024) dengan teknik dokumentasi dan wawancara dengan judul “ Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Teh Poci Siantan “, Penerapan SAK EMKM meningkat karena pemilik termotivasi belajar akuntansi. Dari yang sebelumnya sangat sederhana, sekarang pemilik mulai mempelajari Pelaporan yang sesuai standar akuntansi.

7. Penelitian (Mandey, et al., 2018) dengan judul “ Studi Kualitatif Tentang Manfaat Dan Kerugian Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Ud Mitra Pelita menunjukkan usaha ini belum menyusun laporan keuangan. Tidak adanya sumber daya yang memadai untuk membuat laporan ini dan pemilik berpendapatan pembuatan laporan membuang-buang waktu. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif.
8. Penelitian yang dilakukan (Setianingrum, et al., 2025) dengan judul “Evaluasi Penerapan SAK EMKM Pada Laporan Keuangan UMKM Bagus Laundry menunjukkan Bagus Laundry sudah memiliki kesadaran untuk membuat Laporan Keuangan, tapi masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya seperti ketidaksesuaian dalam pengakuan persediaan, sehingga laporan yang ada tidak valid.
9. Penelitian dengan judul “Pencatatan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada UMKM MR.Pelangi Semarang)” oleh (Savitri, 2018) menggunakan metode kualitatif dengan analisis teknik data primer(observasi,wawancara) dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pencatatan keuangan yang dilakukan belum maksimal. Pemilik menganggap akuntansi rumit dan biaya nya mahal jika harus

mempekerjakan orang untuk tenaga profesional yang melakukan pelaporan akuntansi.

10. Dalam penelitian berjudul “Penyusunan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Desa Pengujan (Hasnarika, 2023) teknik penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi langsung dengan pemilik UMKM di Desa Pengujan. Hasilnya didapati pelaku UMKM tidak dapat memisahkan keuangan usaha dengan pribadi. Minimnya pengetahuan dan waktu akan pelaporan keuangan, sehingga laporan tidak disusun.

B. Deskripsi Teori

1. Standar Akuntansi Keuangan EMKM

   a. Standar Akuntansi

      Standar akuntansi merupakan seperangkat aturan serta prinsip-prinsip yang kegunaannya difungsikan untuk mengukur, mengakui, dan melaporkan posisi keuangan, yang bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip yang dimuat meliputi konsep dasar seperti nilai pendapatan saat itu, pengukuran aset berdasarkan nilai wajar atau biaya historis, serta penampilan laporan keuangan yang menghasilkan posisi keuangan yang wajar. Standar ini dihadirkan guna memastikan relevansi, transparansi, dan konsistensi informasi keuangan, sehingga pengguna laporan seperti investor, kreditor, dan manajemen dapat menghasilkan keputusan yang

dirasa tepat. Di Indonesia sendiri standar ini diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Supardi, 2018)

Menurut (Wardiyah, 2016) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang digunakan suatu entitas memiliki akuntabilitas publik yaitu usaha yang telah terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia(asuransi, perbankan dan dana pensiun). Standar ini di adopsi dari IFRS, dikarenakan Indonesia lewat IAI telah mengambil keputusan untuk adopsi penuh IFRS sejak tahun 2012.

b. Pengertian SAK EMKM

Ikatan Akuntan Indonesia(IAI) mencetuskan sebuah acuan standar akuntansi yang dinamai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang dihadirkan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi entitas berskala kecil dengan transaksi sederhana. SAK EMKM telah resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla(JK) pada tanggal 08 Desember 2016, berlaku efektif Menurut (Indonesia, I. A, 2016), SAK EMKM ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditor, pemilik, dan pihak lain.

Menurut (Kartikahadi, et al., 2023) berdasarkan pedoman yang dimuat dalam SAK EMKM, dibandingkan SAK lainnya seperti SAK Umum atau SAK ETAP, SAK EMKM jauh lebih ringkas dan mudah diterapkan karena hanya mewajibkan tiga laporan keuangan, yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan

   Merupakan neraca yang memberikan gambaran posisi keuangan berupa aset, utang, serta ekuitas modal dalam suatu masa. (Prihadi & Toto, 2019)

2. Laporan Laba Rugi

   Berisikan penggambaran kinerja yang dilihat dari laba, berupa selisih antara pendapatan dan biaya dalam satu periode. Laporan Laba Rugi disusun dalam dua bentuk pilihan menurut (Hery, 2017) sebagai berikut:

   a. Bentuk langsung (*Single-step*)

      Laporan laba rugi dalam bentuk langsung memberikan penekanan terhadap total pendapatan dan total beban sebagai penentu laba/rugi bersih. Semua yang menyangkut penghasilan dan pengeluaran baik itu lewat kegiatan didalam perusahaan maupun kegiatan di luar perusahaan atau pemasukan dan pengeluaran lain, semua dihitung menjadi satu kesatuan pemasukan dan pengeluaran.

   b. Bentuk Bertahap (*Multiple-step*)

      Laporan laba rugi dalam bentuk bertahap menggaris bawahi tahapan dalam penentuan laba bersih, lewat bagian operasi yang dipisahkan dan dibedakan dengan bagian yang tidak beroperasi.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018) entitas dapat menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

   Dalam praktiknya, setiap akun dalam laporan keuangan menampilkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan, menurut IAI dalam SAK EMKM. Detail tambahan ini meliputi:

   a. Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
   b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
   c. Informasi tambahan serta detail akan sebuah akun tertentu yang memuat transaksi penting dan materil sehingga berfunsi terhadap pengguna dalam memahami laporan keuangan yang dimuat.

Laporan keuangan yang lengkap didalamnya terdapat catatan atas laporan keuangan yang bersifat integral terhadap posisi keuangan perusahaan (Prihadi & Toto, 2019)

Yang dapat menjadi perhatian bagi para pelaku usaha, SAK EMKM juga mengatur transaksi penggunaan transaksi yang khusus, seperti investasi pada ventura bersama, transaksi dalam mata uang asing, pendapatan hibah, dan perubahan kebijakan akuntansi sehingga dapat disimpulkan bahwa SAK EMKM telah mencakup serangkaian

kebutuhan dasar pengguna. Oleh karena itu, UMKM sebagai penggunanya perlu memberikan perhatian lebih untuk penggunaan SAK EMKM. Laporan keuangan yang disajikan dalam pelaporan yang diatur dalam SAK EMKM adalah laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi satu periode dan catatan atas laporan keuangan serta rincian akun tertentu yang relevan. Informasi yang perlu dituangkan dalam laporan keuangan tersebut diantaranya, identitas entitas penyusun dan menampilkan laporan keuangan, tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan, satuan mata uang dan pembulatan angka digunakan dalam penyajian laporan keuangan. (Ahmad Mukoffi, 2018).

SAK EMKM secara sederhana mengemukakan konsep entitas bisnis sebagai salah satu dasarnya, oleh karena itu agar laporan keuangan dapat disusun berdasarkan SAK EMKM, pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi pemilik dengan hasil usaha dan antara suatu usaha dengan usaha lainnya. Laporan yang sesuai standar dapat membantu entitas usaha dalam pengambilan modal pinjaman kepada lembaga- lembaga keuangan sebagai bukti yang konkrit ketika usaha tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. (Syah, et al., 2023)

c. Tujuan SAK EMKM

Menurut (Rahayu, et al., 2020) SAK EKMKM memiliki tujuan sebagai menampilkan kinerja serta posisi keuangan suatu entitas usaha yang diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan bisnis bagi siapapun yang tidak dalam sebuah posisi yang dapat memiliki laporan keuangan khusus agar informasi tersebut dapat terpenuhi. Pihak yang memerlukan informasi ini tidak selalu memangku posisi pemegang saham non manajemen, karena pada umumnya bentuk EMKM belum berupa PT. Namun demikian, banyak pihak berwenang yang juga memerlukan laporan tersebut, seperti halnya otoritas pajak dalam menentukan besaran nilai pajak dan wajib pajak lain, serta aparat pemerintahan yang memerlukan data guna sebagai acuan dasar pembinaan.

SAK EMKM bertujuan memastikan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan dan menjadi standar pengukuran yang harus dipatuhi. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan informasi yang dituangkan di laporan ini sebagai dasar pengambilan usaha. Karenanya, laporan yang disajikan harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK), karena selain sebagai tumpuan dalam penyusunan laporan keuangan, juga dapat diigunakan serta disesuaikan dengan keperluan perusahaan dalam periode tertentu. (Sardjan & Baso, 2023)

Laporan keuangan dapat memperlihatkan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dilimpahkan pada manajemen. SAK EMKM ditujukan untuk kelompok usaha yang belum atau tidak mampu mengikuti standar akuntansi yang diterapkan di SAK ETAP. (Indonesia, I. A, 2016)

d. Komponen Laporan Keuangan SAK EMKM

Menurut (Indonesia, I. A, 2016) laporan yang disyaratkan dalam SAK EMKM mencakup tiga komponen utama, yaitu :

Tabel 1.2

Laporan Keuangan Entitas

ENTITAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20x8 DAN 20X7

DAFTAR ISI

LAPORAN POSISI KEUANGAN……3

LAPORAN LABA RUGI……..2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN……..3

Sumber : (Kartikahadi, et al., 2023)

1) Laporan Posisi Keuangan

Menyajikan informasi berupa aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas tertentu. laporan posisi keuangan didalamnya memuat informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir priode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas menurut SAK EMKM mencakup akun-akun sebagai berikut:

a. kas dan setara kas
b. piutang
c. Persediaan
d. Aset tetap
e. Utang usaha
f. Utang bank

Tabel 1.3

Laporan Posisi Keuangan Entitas (Lanjutan)

ENTITAS **LAPORAN POSISI KEUANGAN** **31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7**			
ASET	**Catatan**	**20X8**	**20X9**
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		**xxx**	**xxx**
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar dimuka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		***xxx***	***xxx***
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		***xxx***	***xxx***
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		***xxx***	***xxx***
JUMLAH LIABILITAS DAN		***xxx***	***xxx***
EKUITAS			

Sumber : (Kartikahadi, et al., 2023)

2) Laporan Laba Rugi

Berisikan gambaran kinerja keuangan UMKM dalam dalam satu periode berupa pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Laporan laba rugi berisikan kepiawaian suatu perusahaan dalam menghasilkan profit pada jangka waktu usaha tertentu. Berdasarkan laporan ini, akan dapat terlihat sejauh mana sebuah manajemen usaha dalam mengelola daya usaha perusahaan. Dengan demikian pihak-pihak terkait seperti investor, kreditur dan manajemen berwenang dapat memilah keputusan yang kiranya nanti akan digunakan dalam penilaian kinerja dan prospek jangka panjang perhitungan usaha. Tampilan laporan yang ditunjukan juga sangat efisien karena telah menampilkan terkait biaya, pendapatan serta laba dan rugi yang telah di dapat perusahaan dalam satu laporan. (Kasmir, 2019)

Menurut IAI dalam SAK EMKM entitas dapat menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas dalam suatu priode . dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Beban keuangan

c. Beban pajak

Tabel 1.4

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (lanjutan)

ENTITAS **LAPORAN LABA RUGI** **UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7**			
PENDAPATAN	**Catatan**	**2x18**	**2x17**
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		***xxx***	***xxx***
BEBAN		**xxx**	**xxx**
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		***xxx***	***xxx***
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak penghasilan	12	**xxx**	**xxx**
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		**xxx**	**xxx**

Sumber : (Kartikahadi, et al., 2023)

3) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Menjelaskan informasi tambahan terkait laporan keuangan, termasuk kebijakan yang digunakan. Dalam SAK EMKM, CALK disusun secara ringkas namun tetap wajib memuat informasi yang

relevan dan material untuk memahami laporan keuangan didalam laporan keuangan menampilkan informasi catatan atas laporan keuangan yang didalamnya berisi tambahan yang memuat:

a) Sebuah pernyataan yang menggaris bawahi laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
b) Ikhtisar akan kebijakan akuntansi yang diambil.
c) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi yang penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Tabel 1.5

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (lanjutan)

ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7

1. UMUM

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.

ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan
Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan
Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang usaha
Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan
Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan *overhead. Overhead* tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. *Overhead* variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap
Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. **KAS**

	20x8	**20x7**
Kas kecil Jakarta- Rupiah	xxx	xxx

5. **GIRO**

	20X8	**20X7**
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx

6. **DEPOSITO**

	20X8	**20X7**
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx

Suku Bunga Deposito :

	20x8	**20x7**
Rupiah	4,50%	5,00%

7. **PIUTANG USAHA**

	20X8	**20X7**
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	**xxx**	**xxx**

8. **BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

	20x8	**20x7**
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	**xxx**	**xxx**

ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7

9. **UTANG BANK**

Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja(KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20x8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

10. **SALDO LABA**

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

11. **PENDAPATAN PENJUALAN**

	20x8	**20x7**
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	xxx	xxx
Jumlah	**xxx**	**xxx**

12. **BEBAN LAIN-LAIN**

	20x8	**20x7**
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	**xxx**	**xxx**

ENTITAS **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** **31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7**		
13. **BEBAN PAJAK PENGHASILAN**		
	20X8	**20X7**
Pajak penghasilan	xxx	xxx

Sumber : (Kartikahadi, et al., 2023)

2. Laporan Keuangan

Dalam bukunya (Janrosl & Khadijah, 2021) menyebutkan laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan sebuah entitas. Laporan keuangan memuat secara konsisten posisi keuangan. Penyajian ini juga mensyaratkan entitas untuk :

a) Memilah dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK
b) Memuat informasi, berupa kebijakan akuntansi sedemikian rupa, sehingga informasi yang ditampilkan relevan, dapat diperbandingkan, andal dan mudah dimengerti.
c) Memberikan informasi tambahan.

Menurut (Kasmir, 2016) Laporan keuangan dapat memberikan gambaran kondisi hasil usaha yang sebenarnya pada sebuah periode dalam usaha yang mana hasilnya dapat dipergunakan berbagai pihak untuk manfaatnya digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk melihat posisi hasil usaha, baik aset, kewajiban maupun modal sehingga pengguna mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Rasionya berupa rasio likuiditas, solvabilitas,

aktivitas, dan profitabilitas. Marjin laba kotor memperlihatkan laba relatif penjualan bersih dan marjin laba bersih memperlihatkan hasil keuntungan dibanding dengan penjualan, dua komponen tersebut merupakan komponen penting dalam analisis laporan keuangan.

Dalam bukunya, (Sujawerni, 2019) menyebutkan laporan biaya produksi dapat disusun secara periodik menyesuaikan kebutuhan, seperti bulanan atau periode tertentu, utamanya terkait kepentingan pengendalian biaya. Selanjutnya (Hansen & Mowen, M., 2009) mengemukakan informasi biaya sifatnya fleksibel sehingga dapat disusun untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek, sehingga tidak harus menunggu satu periode akuntansi tertentu.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021, khusus nya Pasal 35-36 tentang Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan pembaharuan terhadap kriteria UMKM yang di dasarkan pada nilai penjualan tahunan dan modal awal usaha sebagai dasar pendirian maupun pendaftaran kegiatan usaha. Adapun batasan yang ditetapkan dalam modal usaha yang termasuk dalam kategori UMKM dalam (PP) Nomor 7 tahun 2021 sebagai berikut :

1. Usaha Mikro merupakan usaha dengan modal maksimal Rp. 1.000.000,00(satu miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan usaha.

2. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00(lima miliar rupiah) juga tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha di atas Rp. 5.000.000.000,00 sampai batas tertinggi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Sementara itu, bagi pelaku UMKM yang berdiri sebelum diberlakukannya PP tersebut, pengelompokan usaha dilakukan dengan indikator pendapatan usaha per tahun. Kriteria tersebut meliputi :

1. Usaha Mikro yaitu usaha dengan pendapatan paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Usaha Kecil yaitu usaha yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 hingga maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
3. Usaha Menengah yaitu usaha dengan pendapatan tahunan diatas Rp. 15.000.000.000,00 hingga paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2.1

Kriteria UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021

No	Uraian	Kriteria Aset	Kriteria Pendapatan
1.	Usaha Mikro	Maksimal 1 Miliar	Maksimal 2 Miliar
2.	Usaha Kecil	> 1 Miliar – 5 Miliar	>2 Miliar – 15 Miliar
3.	Usaha Menengah	> 5 Miliar – 10 Miliar	>15 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021

Usaha Mikro, Kecil, dan menengah adalah kegiatan ekonomi dimana kekayaan tidak lebih dari 200 juta bersih, terlepas dari bangunan untuk usaha maupun aset tanah. UMKM merupakan usaha kecil yang lahir dan ada dari inisiatif individu dan mengalami perkembangan seiring waktunya berdasarkan kemampuan pemilik dalam mengelola modal, tenaga kerja, produksi, dan pemasaran. UMKM juga dapat didefinisikan sebagai usaha yang di perjalankan oleh seorang warga negara ataupun masyarakat dengan pendapatan tidak lebih dari 1 miliar per tahun nya. (Hasanah & Kamaliatun, 2025)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau perseorangan, badan usaha skala kecil atau usaha rumah tangga. Bisnis ini dapat digolongkan lewat pendapatan tahunan, aset yang dimilik dan jumlah keseluruhah karyawan. UMKM adalah bagian dari salah satu roda

penggerak perekonomian negara. (Tiris Sudrartono, 2022) Kegiata usaha ini berhasil mengatasi kesenjangan perekonomian yang ada. Berbagai kegiatan keseharian masyarakat tidak terlepas dari hasil kreasi UMKM. UMKM pada akhirnya menjadi pilar terpenting bagi ekosistem ekonomi.

Dari (Siregar, 2021), terdapat 3 fungsi UMKM terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia :

1. Roda Pendorong Pemerataan Ekonomi

   UMKM pada dasarnya berperan penting dalam pemerataan ekonomi di Indonesia, terutama bagi kalangan masyarakat golongan menengah kebawah. Dengan hadirrnya UMKM tersebut, masyarakat di pelosok tidak perlu lagi harus merantau ke perkotaan agar mendapatkan penghidupan yang lebih layak lagi. Selain itu juga perputaran ekonomi akhirnya lebih merata dan urbanisasi besar-besaran ke perkotaan berkurang.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

   Tingginya penyerapan tenaga kerja berkat UMKM membuat penurunan tingkat kemiskinan terentaskan sedikit demi sedikit. UMKM secara tidak langsung berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan Devisa Negara

   Jangkauan pasar UMKM yang luas, bahkan hingga keluar negeri berkontribusi meningkatkan devisi negara. Tak sedikit UMKM yang berhasil bersaing di kancah Internasional.

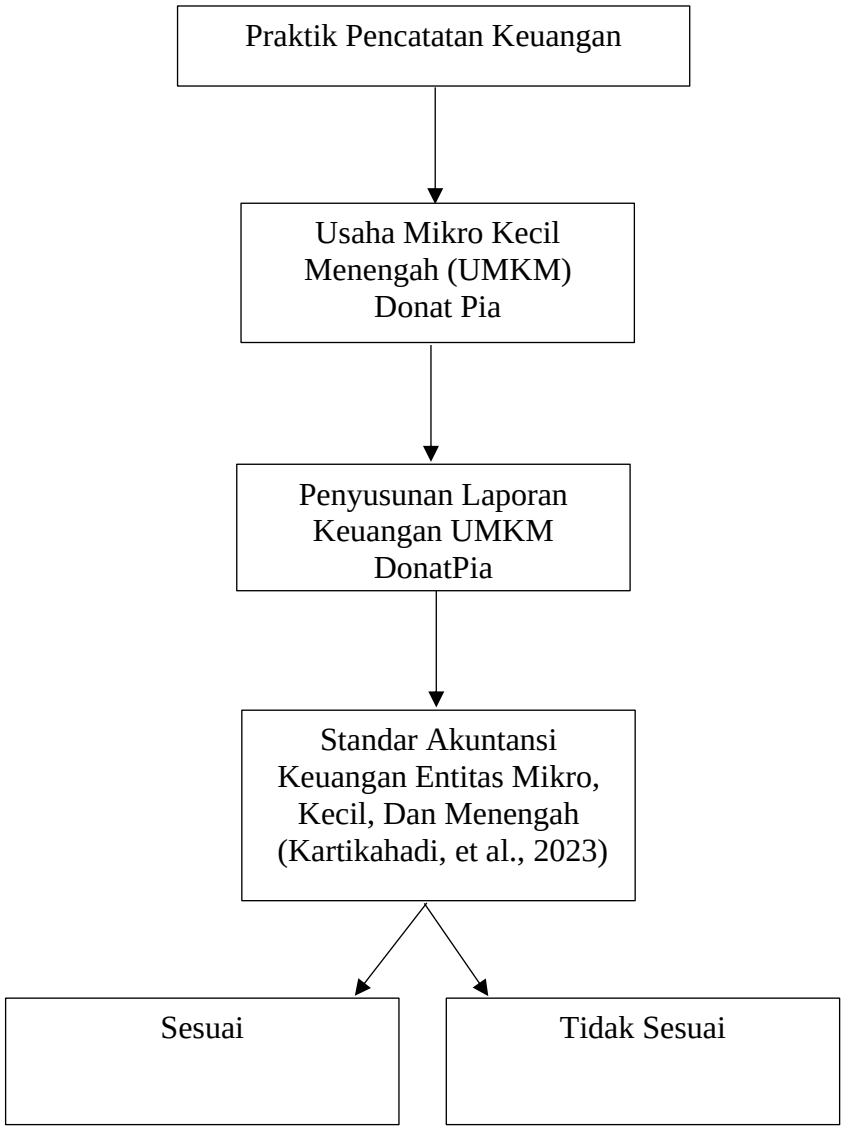
Menurut (Tambunan, 2021) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan golongan usaha yang berperan dominan dalam struktur perekenomian nasional. Lewat kehadirannya, UMKM dapat berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan mampu mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah. UMKM umumnya memiliki modal yang terbatas, teknologi yang relatif sederhana dan manajemen yang masih bersifat tradisional. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala, seperti rendahnya kemampuan dalam berinovasi, akses pembiayaan, dan keterbatasan pencatatan keuangan, UMKM tetap menjadi penggerak utama roda perekonomian karena keberadaannya yang banyak dan perannya dalam meningkatan perekonomian masyarakat.Keberadaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya dengan memberikan lapangan kerja dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal.

C. Kerangka Konseptual

Menurut (Sugiyono, 2019) kerangka konseptual merupakan model pemikiran dimana sebuah teori saling berkaitan dengan faktor yang telah dianggap sebagai asumsi penting. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menjadi dasar dalam proses analisis kondisi nyata yang terjadi pada UMKM DonatPia, serta menjadi panduan dalam proses interpretasi dan pengumpulan data di lapangan. Dibawah ini adalah gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Tabel 2.2

Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah 2025